

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN “PASANG SANGKUR” DALAM RANGKA PENANGANAN STUNTING DI KANTOR KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG

Ade Opik Rohmanudin^{1*}, Osa Nurfitri²

^{1,2}Universitas Sebelas April, Sumedang, Indonesia

*Korespondensi : adeopik@unsap.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui inisiatif “Pasang Sangkur” dalam upaya penanganan stunting di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Program ini merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Sumedang yang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat guna memperkuat kemandirian lokal, khususnya dalam menghadapi permasalahan stunting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi. Informan ditentukan secara purposive yang mencakup aparatur kecamatan, kepala desa, dan masyarakat penerima manfaat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program “Pasang Sangkur” cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap isu stunting melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, pemberian bantuan stimulan, serta pemanfaatan pekarangan rumah untuk ketahanan pangan. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, distribusi bantuan yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya pelatihan. Pemerintah berupaya mengatasi hambatan tersebut melalui pendekatan door to door, sosialisasi aktif, dan komunikasi berbasis empati. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya sosialisasi yang konsisten, distribusi bantuan yang adil, dan peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan untuk memperkuat keberhasilan program dalam menurunkan angka stunting.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Pasang Sangkur, Stunting.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of community empowerment through the “Pasang Sangkur” initiative in addressing stunting in Rancakalong Subdistrict, Sumedang Regency. This program is an innovative effort by the Sumedang Regency Government that emphasizes collaboration between the government and local communities to enhance self-reliance, especially in tackling stunting issues. Using a descriptive qualitative method, data were collected through observation, in-depth interviews, documentation, and triangulation. Informants were selected purposively and included subdistrict officials, village heads, and beneficiary residents. The data were analyzed using the interactive model by Miles and Huberman, which involves data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. Findings show that the “Pasang Sangkur” program has been moderately effective in raising public awareness and participation on stunting

through activities such as training, provision of stimulus assistance, and use of household yards for food security. Nevertheless, several challenges remain, including low community awareness, unequal aid distribution, limited infrastructure, and lack of adequate training. The government addresses these issues through door-to-door outreach, active socialization, and empathy-based communication. The study recommends consistent awareness campaigns, equitable resource distribution, and sustainable capacity building to strengthen the program's success in reducing stunting rates.

Keywords : *Community Empowerment, Pasang Sangkur, Stunting*

A. PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu tantangan paling krusial dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Kondisi ini merujuk pada gangguan pertumbuhan pada anak yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dibandingkan standar usianya akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam jangka panjang, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Dampak dari stunting tidak hanya terbatas pada aspek fisik anak, tetapi juga menyentuh ranah intelektual, psikomotorik, hingga produktivitas anak di masa dewasa. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting nasional tercatat sebesar 21,6%. Meskipun mengalami tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut masih jauh dari target 14% yang ditetapkan dalam RPJMN 2020–2024 dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Stunting bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan faktor-faktor determinan yang bersifat multidimensional, seperti kemiskinan, rendahnya literasi gizi, akses pelayanan kesehatan yang terbatas, sanitasi lingkungan yang buruk, serta pola asuh yang kurang tepat. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan holistik dan integratif, yang tidak hanya berfokus pada aspek medis dan bantuan

gizi, tetapi juga melibatkan upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dengan tujuan memperkuat kapasitas, partisipasi, dan kemandirian mereka dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Menurut Chambers (1993), pemberdayaan adalah proses di mana individu atau kelompok memperoleh kekuatan untuk mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Ini mencakup aspek peningkatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan bukan hanya soal memberikan bantuan, tetapi juga menciptakan ruang di mana masyarakat mampu berpikir kritis, bertindak mandiri, dan berjejaring sosial. Sejalan dengan itu, Mardikanto dan Soebiato (2013) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menjadikan masyarakat lebih sadar, terampil, dan berdaya dalam memanfaatkan potensi lokal demi kesejahteraan kolektif.

Dalam konteks Indonesia, berbagai daerah telah mengadopsi pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi stunting. Kabupaten Sumedang, sebagai salah satu kabupaten dengan kepemimpinan inovatif, merespons persoalan stunting dengan meluncurkan program *Pasang Sangkur*

(*Pamarentah Sareng Warga Ngawangun Silaturahmi Nguatkeun Kamandirian Lembur*), yang secara harfiah berarti pemerintah dan warga membangun silaturahmi untuk memperkuat kemandirian desa. Program ini mengusung semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, dengan mengedepankan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, kebersamaan, keterbukaan, dan kearifan budaya dalam mengelola masalah bersama.

Kegiatan *Pasang Sangkur* difokuskan pada penguatan fungsi-fungsi sosial melalui pemberdayaan, seperti pelatihan pengolahan makanan sehat, budidaya ikan dan sayuran di pekarangan, bantuan stimulan ekonomi bagi keluarga rawan stunting, hingga kunjungan langsung pejabat ke rumah-rumah warga (*door to door*) untuk berdialog dan meninjau kondisi riil lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan teori *Asset-Based Community Development (ABCD)* yang dikembangkan oleh Kretzmann & McKnight (1993). Teori ini menekankan bahwa pembangunan yang efektif dimulai dari pengenalan dan penguatan potensi lokal yang dimiliki masyarakat, bukan dari asumsi kelemahan mereka. Dalam konteks *Pasang Sangkur*, pendekatan ini diwujudkan dalam pendayagunaan sumber daya desa dan keterampilan warga sebagai ujung tombak pengentasan stunting.

Studi Yulianingsih & Rachmawati (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan program penurunan stunting di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi masyarakat menjadi indikator utama bahwa program tidak bersifat top-down dan bukan semata-mata intervensi teknokratik. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas juga

mampu memperkuat modal sosial (*social capital*) dan membangun rasa kepemilikan kolektif atas program yang dijalankan.

Namun demikian, pelaksanaan program *Pasang Sangkur* di Kecamatan Rancakalong masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa diabaikan. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pelatihan atau sosialisasi masih rendah. Beberapa warga menyatakan tidak mengetahui jadwal kegiatan, merasa tidak percaya diri untuk terlibat, atau menganggap kegiatan tidak relevan dengan kebutuhan harian mereka. Hal ini selaras dengan temuan Kurniawati & Hapsari (2021) bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam program penanganan stunting banyak dipengaruhi oleh persepsi negatif terhadap efektivitas program dan beban ekonomi harian yang mengalihkan perhatian warga dari kegiatan komunitas.

Selain itu, terdapat pula hambatan struktural yang bersifat eksternal, seperti keterbatasan anggaran, distribusi bantuan yang belum merata, serta minimnya pendampingan teknis dari tenaga ahli atau kader kesehatan. World Bank (2020) mengungkapkan bahwa agar intervensi gizi dapat efektif, alokasi anggaran daerah untuk sektor ini seharusnya mencapai minimal 2,5% dari total belanja kesehatan. Di banyak daerah, termasuk Sumedang, angka tersebut masih sulit tercapai karena beban fiskal yang terbatas. Ketimpangan akses dan bantuan juga menjadi sumber ketidakpuasan warga. Suryani & Nugroho (2019) menegaskan bahwa keberhasilan intervensi berbasis desa sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan partisipatif dan keakuratan data sasaran. Ketika proses perencanaan tidak melibatkan warga secara menyeluruh, maka program rentan

mengalami bias distribusi dan potensi konflik sosial.

Ketiadaan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) yang memadai juga menjadi penghambat keberhasilan program. Saat ini, pelaporan kegiatan dan pemantauan masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi dengan sistem digital yang real-time. Hal ini membuat penilaian atas dampak program menjadi sulit diukur secara objektif dan terukur. UNICEF (2022) menyarankan agar sistem Monev berbasis teknologi informasi diterapkan di tingkat desa agar setiap intervensi dapat diukur dampaknya dan dilakukan penyesuaian secara cepat berdasarkan data.

Di sisi lain, Pemerintah Kecamatan Rancakalong telah melakukan berbagai strategi adaptif untuk mengatasi hambatan tersebut. Di antaranya adalah pendekatan door to door yang memperkuat trust antara warga dan pemerintah (Narayan, 2005), serta optimalisasi potensi lokal melalui pelatihan dan dukungan berbasis komunitas. Strategi ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga membangun basis keberlanjutan yang kuat melalui penguatan kapasitas masyarakat. Pendekatan *targeted intervention* sebagaimana dikembangkan Bappenas (2021) juga mulai diadopsi, di mana intervensi bantuan dan pelatihan difokuskan pada kelompok paling rentan berdasarkan data mikro kemiskinan dan status gizi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui *Pasang Sangkur* merupakan pendekatan yang menjanjikan dalam penanganan stunting. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada efektivitas implementasi lima fungsi utama pemberdayaan masyarakat: pemungkinan

(enabling), penguatan (empowering), perlindungan (protecting), penyokongan (supporting), dan pemeliharaan (maintaining), sebagaimana dikemukakan oleh Kartasasmita (1996). Penelitian ini menjadi penting karena belum banyak kajian ilmiah yang secara khusus mengkaji bagaimana pendekatan *Pasang Sangkur* diterapkan dalam konteks penanganan stunting, terutama dengan fokus pada efektivitas fungsi pemberdayaan dan tantangan implementasinya di tingkat kecamatan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program *Pasang Sangkur* dalam rangka penanganan stunting di Kecamatan Rancakalong. Kajian ini akan mengupas aspek pelaksanaan, hambatan internal dan eksternal, serta strategi pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal, serta menjadi acuan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penurunan stunting yang lebih tepat sasaran dan berorientasi jangka panjang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan *Pasang Sangkur* dalam rangka penanganan stunting di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Penelitian ini berfokus pada pemaknaan, persepsi, dan interaksi sosial

antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu di Kantor Kecamatan Rancakalong, dengan mempertimbangkan bahwa wilayah ini menjadi salah satu pelaksana aktif kegiatan *Pasang Sangkur* dan memiliki tingkat prevalensi stunting yang relatif tinggi di Kabupaten Sumedang. Informan penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling, meliputi: Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Desa Sukasirnarasa, serta perwakilan masyarakat penerima manfaat kegiatan *Pasang Sangkur*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara: (1) wawancara mendalam terhadap informan kunci guna menggali informasi terkait pelaksanaan, hambatan, dan upaya pemberdayaan masyarakat; (2) observasi lapangan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan kegiatan *Pasang Sangkur*; dan (3) dokumentasi atas arsip, data kegiatan, serta laporan pelaksanaan program. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan metode, untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data penting sesuai fokus penelitian; penyajian data, yaitu menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan interpretasi; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu membuat simpulan temuan penelitian yang terus diverifikasi selama proses berlangsung.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai efektivitas, kendala, serta strategi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan *Pasang Sangkur* dalam konteks penanggulangan stunting secara partisipatif dan berkelanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan *Pasang Sangkur* dalam Rangka Penanganan Stunting

Stunting telah lama menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang kompleks dan multidimensi di Indonesia. Dampaknya tidak hanya mencakup kondisi fisik anak yang tidak optimal, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kecerdasan, daya saing, hingga masa depan produktivitas generasi muda. Pemerintah Indonesia telah menetapkan penurunan angka stunting sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2020–2024 dan upaya ini membutuhkan intervensi lintas sektor yang terintegrasi. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap isu ini melalui pendekatan inovatif berbasis pemberdayaan masyarakat.

Salah satu inovasi penting yang dilakukan adalah Program *Pasang Sangkur* (*Pamarentah Sareng Warga Ngawangun Silaturahmi Nguatkeun Kamandirian Lembur*). Program ini digagas sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial secara partisipatif, dengan menekankan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, kemandirian, dan komunikasi dua arah. Dalam perspektif teori pemberdayaan masyarakat, pendekatan ini selaras dengan

gagasan Mardikanto dan Soebiato (2013) yang menyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mengontrol kehidupannya dan lingkungannya secara mandiri.

Kegiatan *Pasang Sangkur* di Kecamatan Rancakalong dikembangkan berdasarkan lima fungsi pemberdayaan sebagaimana diuraikan oleh Kartasasmita (1996), yaitu *enabling*, *empowering*, *protecting*, *supporting*, dan *maintaining*. Kelima fungsi ini menjadi kerangka kerja dalam menganalisis efektivitas pendekatan pemberdayaan yang diterapkan dalam program ini, khususnya dalam konteks penanganan stunting.

Fungsi Pemungkinan (Enabling)

Fungsi *enabling* berperan dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses sumber daya, informasi, serta layanan dasar yang diperlukan untuk membangun kualitas hidup mereka. Dalam konteks Rancakalong, fungsi ini diwujudkan melalui pelatihan, penyuluhan gizi, edukasi pola asuh, serta forum-forum musyawarah desa yang melibatkan perwakilan masyarakat.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Dari data lapangan, tercatat lebih dari 40% warga yang diundang dalam pelatihan pencegahan stunting tidak hadir. Hal ini mencerminkan bahwa kondisi lingkungan sosial belum sepenuhnya mendukung partisipasi aktif warga.

Menurut Alsop, Bertelsen, dan Holland (2006), terbentuknya *enabling environment* tidak hanya tergantung pada penyediaan fasilitas atau program, tetapi

juga memerlukan perubahan dalam struktur sosial dan nilai-nilai yang menghambat keterlibatan warga. Penelitian Panjaitan dan Puspitasari (2021) juga mengungkap bahwa persepsi masyarakat terhadap stunting sering kali masih keliru—menganggap tubuh pendek sebagai faktor keturunan, bukan sebagai dampak kekurangan gizi kronis.

Kurangnya pemahaman ini menandakan perlunya peningkatan literasi gizi dan kesehatan masyarakat secara lebih masif dan terarah. Program *Pasang Sangkur* masih memiliki ruang besar untuk memperkuat fungsi *enabling* ini melalui pendekatan edukatif yang lebih kontekstual, termasuk dengan melibatkan tokoh masyarakat dan kader lokal dalam proses penyampaian informasi.

Fungsi Penguatan (Empowering)

Fungsi ini berfokus pada upaya meningkatkan kapasitas masyarakat agar mereka memiliki kontrol terhadap sumber daya, kehidupan sosial, dan ekonomi mereka. Di Rancakalong, pemberdayaan dilakukan melalui pemberian bantuan stimulan ekonomi berupa bibit ikan, jamur, serta pelatihan pengelolaan usaha kecil. Tujuannya adalah untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dan kemandirian ekonomi keluarga yang memiliki balita stunting.

Dalam kerangka teori pemberdayaan Chambers (1993), *empowering* berarti proses transformasi di mana masyarakat yang semula bergantung pada bantuan eksternal, secara bertahap memperoleh kendali atas keputusan dan aset yang menentukan hidup mereka. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak penerima bantuan yang masih bergantung pada dukungan teknis dan belum mampu mengelola bantuan secara berkelanjutan.

Studi Yulianingsih & Rachmawati (2022) di Kabupaten Bandung membuktikan bahwa intervensi ekonomi hanya akan efektif jika disertai dengan pendampingan intensif dan pelatihan berkelanjutan. Tanpa proses penguatan kapasitas yang terstruktur, bantuan yang diberikan justru berisiko menciptakan ketergantungan baru. Hal ini juga terjadi di Rancakalong, di mana banyak warga penerima bantuan belum mampu mengembangkan potensi yang ada menjadi kegiatan ekonomi produktif secara mandiri.

Dengan demikian, fungsi *empowering* dalam *Pasang Sangkur* perlu ditingkatkan melalui desain pelatihan berbasis kompetensi, integrasi dengan lembaga ekonomi lokal seperti BUMDes, dan kehadiran tenaga pendamping yang profesional dan konsisten.

Fungsi Perlindungan (Protecting)

Fungsi perlindungan menekankan pada pentingnya intervensi terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di Rancakalong, perlindungan dilakukan melalui pemetaan rumah tangga rawan stunting dan pemberian makanan tambahan, vitamin, serta bantuan kesehatan preventif.

Namun, pelaksanaan fungsi ini masih menemui kendala pada aspek akurasi data dan verifikasi sasaran. Banyak warga yang seharusnya layak menerima bantuan tidak terdata atau tidak masuk dalam sistem karena proses identifikasi yang tidak menyeluruh. Narayan et al. (2015) menegaskan bahwa perlindungan sosial hanya akan efektif jika berbasis data yang akurat, partisipatif, dan inklusif. Ketimpangan distribusi bantuan dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan mengurangi kepercayaan masyarakat

terhadap program pemerintah.

Temuan Hermawan (2020) di Kabupaten Cianjur juga menunjukkan pentingnya peran kader dan tokoh masyarakat dalam menjamin keadilan distribusi bantuan. Oleh karena itu, fungsi *protecting* dalam *Pasang Sangkur* memerlukan pembaruan sistem pendataan terintegrasi antar-lembaga, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses validasi.

Fungsi Penyokongan (Supporting)

Fungsi ini mencakup pemberian dukungan moral, sosial, maupun material kepada masyarakat agar mereka memiliki ketahanan menghadapi krisis. *Pasang Sangkur* menjalankan fungsi ini melalui silaturahmi langsung antara aparat pemerintah dan warga, dialog komunitas, serta penyampaian informasi berbasis pendekatan personal.

Menurut Putnam (2000), keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada *social capital*, yaitu jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang mengikat masyarakat untuk bertindak bersama secara efektif. Dalam hal ini, *Pasang Sangkur* mampu membangun kohesi sosial yang memperkuat solidaritas antarwarga dan antara warga dengan pemerintah.

Namun demikian, seperti dikemukakan oleh Rowlands (1997) dalam teorinya *empowerment ladder*, dukungan yang diberikan oleh pemerintah seharusnya tidak berhenti pada level *supporting*, tetapi harus meningkat menuju *empowering*. Saat ini, penyokongan yang diberikan masih bersifat insidental dan belum memiliki rencana keberlanjutan yang jelas. Studi Fitriyani et al. (2021) menunjukkan bahwa bantuan ekonomi tanpa sistem keberlanjutan dan monitoring hanya memberi dampak sementara terhadap status

gizi keluarga.

Agar fungsi ini optimal, program perlu dikaitkan dengan jaringan dukungan lain seperti kelompok perempuan, koperasi desa, serta jejaring lintas sektor di bidang pendidikan dan kesehatan.

Fungsi Pemeliharaan (Maintaining)

Fungsi terakhir dari pemberdayaan adalah *maintaining*, yaitu upaya menjaga agar program yang telah dijalankan dapat berkelanjutan dan tidak berhenti setelah intervensi selesai. Sayangnya, di Kecamatan Rancakalong, fungsi ini belum tertata dengan baik. Belum tersedia sistem monitoring dan evaluasi (Monev) yang terintegrasi yang dapat melacak efektivitas kegiatan dan dampaknya terhadap penurunan angka stunting.

Keban (2008) menyatakan bahwa keberlanjutan pemberdayaan masyarakat sangat tergantung pada integrasi program ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah desa (RPJMDes), serta adanya dukungan anggaran dan kelembagaan yang kuat. Saat ini, *Pasang Sangkur* masih berjalan paralel dengan program-program desa lain, belum sepenuhnya menjadi bagian dari perencanaan terintegrasi desa.

Penelitian Susilowati et al. (2019) juga menunjukkan bahwa desa-desa yang mengintegrasikan program pemberdayaan ke dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam penanggulangan stunting. Oleh karena itu, perlu dibentuk kerangka kerja jangka panjang yang mengatur siklus kegiatan, indikator capaian, serta mekanisme evaluasi berbasis digital seperti dashboard desa.

2. Faktor-Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat melalui *Pasang Sangkur*

Berdasarkan hasil observasi dan

wawancara, hambatan terbagi menjadi dua, yaitu internal (individu masyarakat) dan eksternal (kebijakan dan sistem).

Faktor internal

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks penanganan stunting di Kecamatan Rancakalong tidak terlepas dari berbagai faktor internal yang berasal dari individu atau kelompok masyarakat itu sendiri. Salah satu faktor utama yang sangat memengaruhi keberhasilan program adalah rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya ibu-ibu, terhadap pentingnya gizi dan kesehatan. Dalam banyak kasus, masyarakat belum memahami bahwa stunting bukan hanya soal tubuh pendek, tetapi merupakan indikator kekurangan gizi kronis yang berdampak jangka panjang terhadap perkembangan otak, kognisi, dan produktivitas anak. Hasil penelitian Saputri et al. (2020) di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan ibu mengenai pola makan sehat dan kebutuhan gizi balita menjadi penyebab dominan tingginya prevalensi stunting. Hal serupa juga ditemukan di Rancakalong, di mana sebagian warga menganggap stunting sebagai faktor keturunan atau kondisi alami yang tidak perlu dikhawatirkan. Hal ini mencerminkan kurangnya literasi gizi yang menjadi hambatan awal dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pencegahan stunting.

Selain itu, masalah rendahnya kepercayaan diri dan kapasitas ekonomi masyarakat juga menjadi penghambat signifikan. Banyak orang tua balita yang merasa tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha ekonomi produktif, meskipun telah menerima bantuan stimulan seperti bibit ikan atau jamur. Mereka cenderung pasif dan tidak yakin bahwa

bantuan tersebut dapat mengubah kondisi hidup mereka. Menurut Laverack & Wallerstein (2001), keberdayaan sangat erat kaitannya dengan *self-efficacy*, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya mengubah keadaan. Tanpa rasa percaya diri, program pemberdayaan akan berisiko menciptakan ketergantungan baru terhadap bantuan pemerintah, alih-alih membangun kemandirian.

Hambatan internal lain yang tak kalah penting adalah minimnya komunikasi terbuka antara masyarakat dan pemerintah. Dalam proses pelaksanaan program seperti *Pasang Sangkur*, komunikasi dua arah sangat penting untuk menjaring aspirasi, menyelesaikan keluhan, dan membangun rasa memiliki. Sayangnya, masih banyak warga yang merasa enggan menyampaikan pendapat atau kritik terhadap program yang ada, baik karena budaya sungkan maupun tidak terbiasa menyuarakan suara mereka di forum publik. Menurut Friedmann (1992), pemberdayaan sejati hanya mungkin terjadi bila ada komunikasi horizontal yang egaliter, di mana semua pihak merasa setara dan didengar. Kurangnya saluran komunikasi terbuka ini membuat banyak persoalan tidak terdeteksi sejak awal dan menyebabkan kebijakan menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan nyata warga.

Terakhir, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial seperti pelatihan, sosialisasi, atau musyawarah desa juga menjadi indikator lemahnya keterlibatan aktif warga dalam proses pemberdayaan. Ketidakhadiran dalam forum-forum tersebut bukan semata karena tidak tertarik, tetapi sering kali karena masyarakat terjebak dalam rutinitas ekonomi harian yang menyita waktu, atau karena mereka merasa program tersebut tidak relevan dengan kebutuhan mereka.

Kurniawati & Hapsari (2021) menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam program stunting banyak disebabkan oleh kurangnya kepercayaan terhadap efektivitas program dan persepsi bahwa manfaatnya tidak langsung dirasakan. Padahal, dalam pemberdayaan berbasis masyarakat, partisipasi bukan hanya hak tetapi juga kewajiban yang menentukan keberhasilan program jangka panjang.

Secara keseluruhan, faktor-faktor internal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting tidak cukup hanya dengan menyediakan program dan bantuan. Dibutuhkan pendekatan yang lebih personal, berbasis edukasi dan psikososial, agar masyarakat mampu membangun kesadaran kritis, percaya diri, serta partisipasi aktif sebagai agen perubahan dalam lingkungan mereka sendiri. Tanpa intervensi pada faktor-faktor internal ini, upaya struktural dari pemerintah tidak akan berdampak signifikan dan berkelanjutan.

Faktor Eksternal

Selain hambatan internal, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan *Pasang Sangkur* di Kecamatan Rancakalong juga dihadapkan pada berbagai faktor eksternal yang bersifat struktural dan sistemik. Salah satu yang paling dominan adalah keterbatasan anggaran program. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas penanganan stunting, kebutuhan pendanaan untuk intervensi gizi dan kesehatan pun semakin besar. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang disediakan masih jauh dari memadai. Mengacu pada rekomendasi World Bank (2020), intervensi gizi yang efektif perlu mendapatkan alokasi minimal sebesar 2,5% dari total anggaran kesehatan

daerah. Di Kecamatan Rancakalong, angka ini belum tercapai, sehingga program yang dirancang tidak dapat menjangkau seluruh desa atau keluarga yang membutuhkan. Implikasi langsung dari keterbatasan anggaran ini adalah pembatasan skala intervensi dan kualitas pendampingan yang diberikan.

Faktor eksternal kedua yang turut menghambat efektivitas pemberdayaan adalah distribusi bantuan yang belum merata. Program seperti pemberian bibit jamur, benih ikan, maupun stimulan gizi hanya mencakup sebagian desa yang dianggap prioritas, sementara desa lain yang juga memiliki kasus stunting tinggi tidak terakomodasi. Ketimpangan ini menimbulkan kesan ketidakadilan sosial yang bisa memicu konflik horizontal di tingkat masyarakat. Penelitian Suryani & Nugroho (2019) menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi stunting di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan partisipatif dan akurasi data sasaran. Ketika perencanaan dilakukan tanpa partisipasi aktif masyarakat dan data yang digunakan tidak terbaru, maka distribusi bantuan berisiko bias dan tidak tepat sasaran. Di Rancakalong, ketidaksinkronan data antara desa, Puskesmas, dan dinas terkait menjadi salah satu penyebab utama terjadinya distribusi yang timpang.

Kekurangan tenaga pendamping juga menjadi kendala signifikan dalam program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan *Pasang Sangkur* membutuhkan pendamping yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga keterampilan komunikasi interpersonal dan pemahaman sosial budaya lokal. Sayangnya, ketersediaan kader gizi dan pendamping desa masih terbatas, sehingga tidak semua

keluarga penerima manfaat mendapat bimbingan secara optimal. Titaley et al. (2021) menegaskan bahwa kehadiran kader dan pendamping gizi berkontribusi besar terhadap perubahan perilaku gizi keluarga dan keberhasilan program penurunan stunting. Tanpa kehadiran pendamping, proses internalisasi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan keluarga dalam mencegah stunting akan berjalan lambat atau bahkan gagal.

Faktor eksternal terakhir yang tak kalah penting adalah ketiadaan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) yang memadai. Dalam program pemberdayaan, Monev menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak kegiatan secara berkelanjutan. Di Rancakalong, belum tersedia sistem Monev yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis data real-time. Tanpa Monev yang kuat, program *Pasang Sangkur* berisiko kehilangan arah dan tidak dapat mengukur capaian atau menyesuaikan strategi. UNICEF (2022) merekomendasikan penerapan sistem Monev digital berbasis dashboard terpadu desa sebagai alat pemantauan yang efektif, akuntabel, dan responsif. Sayangnya, kapasitas teknologi informasi di sebagian besar desa di Rancakalong masih terbatas, sehingga proses pemantauan lebih banyak dilakukan secara manual, yang rawan bias dan keterlambatan data.

Dari keempat faktor eksternal tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh motivasi individu, tetapi juga sangat tergantung pada dukungan sistemik dari aspek anggaran, perencanaan, tenaga pelaksana, dan sistem evaluasi. Tanpa pembenahan pada faktor-faktor ini, program penanganan stunting

melalui pendekatan pemberdayaan seperti *Pasang Sangkur* berpotensi stagnan dan tidak berkelanjutan.

3. Strategi Pemerintah Kecamatan Rancakalong dalam Mengatasi Hambatan Pemberdayaan Masyarakat melalui *Pasang Sangkur*

Menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan *Pasang Sangkur*, Pemerintah Kecamatan Rancakalong telah mengembangkan sejumlah strategi adaptif yang berpijak pada pendekatan partisipatif dan berbasis kearifan lokal. Strategi ini tidak hanya difokuskan pada penyelesaian masalah teknis semata, tetapi juga diarahkan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan memperkuat keberlanjutan program.

Salah satu strategi yang cukup efektif adalah penerapan pendekatan door to door, yakni kunjungan langsung aparaturnya kecamatan atau desa ke rumah-rumah warga, khususnya yang memiliki balita stunting atau masuk kategori miskin rentan. Pendekatan ini memungkinkan komunikasi yang lebih personal, empatik, dan dua arah, serta membantu pemerintah memahami kondisi riil masyarakat tanpa perantara birokrasi yang kaku. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Narayan (2005) yang menekankan pentingnya kedekatan emosional dan kehadiran negara secara langsung di tengah masyarakat sebagai fondasi terbentuknya *trust* dan *social responsiveness*. Dalam konteks Rancakalong, pendekatan ini juga menjadi sarana untuk mendeteksi permasalahan tersembunyi yang sering kali tidak muncul dalam forum formal.

Strategi kedua adalah penggalian

potensi lokal masyarakat melalui pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)* yang diperkenalkan oleh Kretzmann dan McKnight (1993). Pendekatan ini memfokuskan pada penguatan aset dan sumber daya yang telah dimiliki oleh komunitas, seperti keterampilan bertani, beternak, atau mengolah hasil bumi. Pemerintah kecamatan tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mengenali dan mengembangkan potensi lokal sebagai basis kemandirian ekonomi keluarga. Pendekatan ini terbukti lebih berkelanjutan karena tidak menempatkan masyarakat sebagai objek bantuan, melainkan sebagai subjek pembangunan.

Selanjutnya, pemerintah juga menerapkan komunikasi empatik dan sosialisasi aktif untuk meningkatkan akuntabilitas sosial (*social accountability*). Komunikasi yang terbuka, partisipatif, dan menggunakan bahasa keseharian masyarakat terbukti lebih efektif dalam membangun pemahaman serta meningkatkan keterlibatan warga dalam program. Fox (2015) menjelaskan bahwa keberhasilan program intervensi lokal sangat tergantung pada *horizontal accountability*—yakni hubungan saling percaya dan pengawasan antara masyarakat dan pemimpinnya. Di Rancakalong, tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan RT/RW turut dilibatkan sebagai jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah dalam setiap kegiatan *Pasang Sangkur*.

Strategi terakhir adalah penerapan distribusi bantuan berbasis kebutuhan atau *targeted intervention*. Pemerintah mulai mengidentifikasi rumah tangga berdasarkan indikator kemiskinan dan kondisi gizi mikro secara lebih spesifik. Pendekatan ini

selaras dengan arah kebijakan nasional yang direkomendasikan oleh Bappenas (2021), yaitu pentingnya intervensi yang disesuaikan dengan karakteristik lokal dan berbasis data mikro untuk mencapai efisiensi dan ketepatan sasaran. Dalam implementasinya, data Puskesmas, Dinas Sosial, dan input dari kader desa digunakan secara terpadu untuk memutuskan siapa yang paling membutuhkan bantuan dalam waktu dan jenis yang tepat.

Keempat strategi ini menunjukkan bahwa pemerintah Kecamatan Rancakalong tidak hanya bersandar pada pendekatan administratif dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat, tetapi juga mencoba membangun *social infrastructure* yang berbasis pada relasi, kepercayaan, dan penguatan modal sosial. Pendekatan ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang tidak bersifat top-down, tetapi tumbuh dari bawah secara berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Program *Pasang Sangkur* merupakan inovasi pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting di Kecamatan Rancakalong. Melalui lima fungsi pemberdayaan, program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, meskipun masih menghadapi hambatan seperti rendahnya literasi gizi, partisipasi yang minim, keterbatasan anggaran, dan kurangnya sistem monitoring.

Pemerintah setempat telah merespons hambatan tersebut dengan strategi *door to door*, penguatan potensi lokal, komunikasi empatik, dan intervensi berbasis data. Namun, keberhasilan jangka panjang masih membutuhkan integrasi program dalam perencanaan desa serta

dukungan anggaran dan kelembagaan yang lebih kuat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alsop, R., Bertelsen, M., & Holland, J. (2006). *Empowerment in practice: From analysis to implementation*. World Bank Publications.
- Bappenas. (2021). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Chambers, R. (1993). *Challenging the professions: Frontiers for rural development*. Intermediate Technology Publications.
- Fitriyani, P., Amalia, R., & Nugraha, A. (2021). Keberlanjutan program intervensi stunting: Studi kasus di wilayah pedesaan. *Jurnal Gizi dan Pemberdayaan*, 7(1), 55–64.
- Fox, J. A. (2015). Social accountability: What does the evidence really say? *World Development*, 72, 346–361. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011>
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Blackwell.
- Hermawan, D. (2020). Partisipasi kader dalam distribusi bantuan stunting di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 18(3), 145–156.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. CIDES.

- Keban, T. Y. (2008). *Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori dan isu*. Gava Media.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. ACTA Publications.
- Kurniawati, R., & Hapsari, D. W. (2021). Persepsi masyarakat terhadap efektivitas program stunting di pedesaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(2), 120–130.
- Laverack, G., & Wallerstein, N. (2001). Measuring community empowerment: A fresh look at organizational domains. *Health Promotion International*, 16(2), 179–185.
<https://doi.org/10.1093/heapro/16.2.179>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Narayan, D. (2005). *Measuring empowerment: Cross-disciplinary perspectives*. World Bank.
- Narayan, D., Chambers, R., Shah, M. K., & Petesch, P. (2015). *Voices of the poor: Crying out for change*. Oxford University Press.
- Panjaitan, D. M., & Puspitasari, E. (2021). Mispersepsi masyarakat tentang stunting di wilayah urban. *Jurnal Gizi Indonesia*, 9(1), 25–34.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon and Schuster.
- Saputri, R. E., Widodo, W., & Arifin, A. (2020). Determinan pengetahuan ibu terhadap kejadian stunting di NTT. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 11(1), 65–74.
- Suryani, I., & Nugroho, H. W. (2019). Perencanaan partisipatif dan akurasi data dalam program stunting desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 6(2), 89–102.
- Susilowati, I., Kurniasih, D., & Nuraeni, I. (2019). Integrasi program pemberdayaan dalam RPJMDes untuk keberhasilan program stunting. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 25–39.
- Titaley, C. R., Ariawan, I., Hapsari, D., & Dibley, M. J. (2021). The role of community health workers in reducing childhood stunting in Indonesia. *International Journal of Child Health and Nutrition*, 10(3), 123–132.
- UNICEF. (2022). *Monitoring and evaluation for community-based nutrition interventions*. United Nations Children's Fund.
- World Bank. (2020). *Investing in nutrition: The foundation for development*. The World Bank Group.
- Yulianingsih, E., & Rachmawati, T. (2022). Evaluasi intervensi pemberdayaan ekonomi keluarga dalam menurunkan angka stunting. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 5(1), 42–57